

DAMPAK KEBIJAKAN BIAYA PENDIDIKAN TERHADAP AKSES DAN PARTISIPASI SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH SIDOKERTO, PLUPUH, SRAGEN

Isnaini¹, Harsono MS²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email: Q100250027@student.ums.ac.id



DOI: <https://doi.org/10.34125/jkps.v11i1.1588>

Sections Info

Article history:

Submitted: 13 January 2026

Final Revised: 24 January 2026

Accepted: 10 February 2026

Published: 24 February 2026

Keywords:

Education Cost Policy

Access To Schooling

School Participation

Madrasah Financing



ABSTRAK

This research examines how education-cost policies shape access and participation in a community-based Islamic primary school, focusing on Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Sidokerto, Plupuh, Sragen, which serves 352 students with 20 teachers. The research aims to explain why “school costs” remain a meaningful determinant even when the government expands operational support and establishes education financing standards. A descriptive case-study design is employed by combining policy review and school-level financing mapping to identify cost components borne by schools and households. The findings highlight three patterns. Operational support reduces barriers related to routine school fees, yet indirect costs – such as uniforms, transportation, learning materials, and informal contributions – remain decisive for families. Participation is more than enrolment: continuity of attendance, learning engagement, and involvement in extracurricular activities are sensitive to household cash flow and the timing of support received. School governance also plays a decisive role in translating policy into real relief through transparent budgeting, fair targeting of subsidies, and flexible payment arrangements.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan biaya pendidikan memengaruhi akses dan partisipasi sekolah pada konteks madrasah dasar, dengan fokus pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Sidokerto, Plupuh, Sragen yang melayani 352 siswa dengan 20 guru. Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengapa “biaya sekolah” tetap menjadi faktor penentu meskipun pemerintah memperluas dukungan operasional dan menetapkan standar pembiayaan satuan pendidikan. Metode penelitian menggunakan studi kasus deskriptif dengan memadukan telaah kebijakan dan pemetaan pembiayaan di tingkat sekolah untuk mengidentifikasi komponen biaya yang ditanggung sekolah maupun keluarga. Temuan menunjukkan tiga kecenderungan utama. Dukungan operasional membantu menekan hambatan biaya rutin, tetapi biaya tidak langsung seperti seragam, transportasi, perangkat belajar, serta kontribusi informal masih berpengaruh kuat terhadap keputusan bersekolah keluarga. Partisipasi juga bukan sekadar status terdaftar; keberlanjutan kehadiran, keterlibatan belajar, dan partisipasi kegiatan pengembangan diri sangat dipengaruhi oleh arus kas keluarga dan ketepatan waktu dukungan yang diterima. Selain itu, tata kelola sekolah menentukan apakah kebijakan benar-benar menjadi keringanan melalui anggaran yang transparan, subsidi tepat sasaran, serta skema pembayaran yang adaptif

Kata kunci: Kebijakan Biaya Pendidikan, Akses Sekolah, Partisipasi Sekolah, Pembiayaan Madrasah

PENDAHULUAN

Di banyak desa di Jawa, keputusan menyekolahkan anak sering terdengar sederhana: “yang penting anak masuk sekolah.” Namun bagi keluarga, realitasnya jarang sesederhana itu. Ketika tahun ajaran dimulai, daftar kebutuhan langsung muncul: seragam, buku, tas, iuran kegiatan, transportasi, sampai uang saku. Sebagian biaya bersifat formal, sebagian lain hadir sebagai “kesepakatan sosial” yang tidak selalu dituliskan tetapi terasa wajib. Pada titik inilah kebijakan biaya pendidikan menjadi penting: bukan hanya soal besar-kecilnya dana dari negara, melainkan apakah kebijakan tersebut benar-benar menutup celah biaya yang membuat keluarga menunda, pindah, atau bahkan menghentikan sekolah anak.

Secara nasional, Indonesia memiliki kerangka pendanaan pendidikan yang terus diperbarui, baik melalui bantuan operasional satuan pendidikan maupun standar pembiayaan yang menjadi acuan biaya investasi dan operasional di PAUD, pendidikan dasar, dan menengah (Kemendikbudristek, 2022; Kemendikbudristek, 2023). Pada sisi lain, madrasah memiliki karakter ganda: ia menjalankan kurikulum pendidikan dasar sekaligus kekhasan pendidikan keagamaan, serta dikelola dalam ekosistem regulasi yang bertemu antara kebijakan pendidikan nasional dan kebijakan Kementerian Agama. Dalam praktiknya, madrasah dasar seperti MI menghadapi tuntutan layanan yang semakin kompleks: mutu pembelajaran, layanan keagamaan, administrasi berbasis digital, sampai pelibatan masyarakat. Kompleksitas ini mudah berubah menjadi biaya, terutama bila dukungan operasional tidak cukup lentur menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Data nasional menunjukkan partisipasi pendidikan memang membaik dalam banyak indikator, tetapi kesenjangan tetap hadir antarwilayah, kelompok sosial-ekonomi, dan jenis satuan pendidikan. Publikasi statistik pendidikan berbasis Susenas menyediakan gambaran bahwa indikator proses dan capaian pendidikan tetap perlu dibaca bersama latar sosial-ekonomi rumah tangga (BPS, 2023). Pada level makro, belanja pendidikan pemerintah dapat dilihat dari rasio pengeluaran pendidikan terhadap PDB yang dilaporkan melalui basis data internasional (World Bank, 2025). Namun, angka makro tidak otomatis menjelaskan “rasa mahal” yang dialami keluarga. Karena itu, literatur terbaru menekankan pentingnya menghubungkan pendanaan publik dengan pengeluaran yang benar-benar dikeluarkan rumah tangga: iuran sekolah, seragam, transportasi, hingga kursus tambahan. Studi Ayu dan Qibthiyah (2023), misalnya, menunjukkan hubungan bahwa peningkatan belanja pendidikan pemerintah daerah berkaitan dengan berkurangnya sebagian komponen pengeluaran pendidikan rumah tangga, tetapi dampaknya tidak selalu merata bagi seluruh kelompok pendapatan dan jenis pengeluaran. Temuan seperti ini mengingatkan bahwa kebijakan biaya pendidikan bisa mengurangi beban, tetapi belum tentu menghilangkan hambatan.

Kebijakan bantuan terarah pada siswa juga menjadi bagian penting dari ekosistem biaya pendidikan. Program Indonesia Pintar (PIP) dirancang membantu anak dari keluarga miskin dan rentan agar tetap bersekolah, dengan rekomendasi penguatan sasaran dan perluasan jangkauan termasuk pada anak yang belum bersekolah atau berisiko putus sekolah (PSKP, 2022). Dalam studi empiris, bantuan tunai pendidikan dapat menurunkan peluang putus sekolah pada kelompok tertentu, meskipun efeknya berbeda antarjenjang dan periode waktu; misalnya, analisis berbasis Susenas sebelum dan saat pandemi menemukan PIP lebih konsisten menurunkan probabilitas putus sekolah pada jenjang tertentu dibanding jenjang lain (Samalo & Jasmina, 2024). Artinya, desain kebijakan bisa benar, tetapi kinerja kebijakan tetap dipengaruhi konteks: kapan dana turun, bagaimana keluarga mengakses, dan apakah biaya yang dominan di suatu jenjang memang ditutup oleh bantuan.

Dalam konteks madrasah, kebijakan bantuan operasional juga memiliki petunjuk teknis tersendiri. Misalnya, perubahan juknis pengelolaan bantuan operasional pada madrasah tahun anggaran 2022 menunjukkan adanya upaya penyesuaian aturan agar penggunaan dana lebih efektif, termasuk penguatan tata kelola dan pelaporan (Kementerian Agama, 2022). Namun, di lapangan, tantangan klasik sering muncul: keterlambatan penyaluran, pembatasan komponen belanja yang tidak selalu sesuai kebutuhan, dan beban administrasi yang menyita waktu pendidik. Kajian literatur tentang BOS juga menegaskan bahwa dana operasional cenderung mendorong partisipasi, tetapi masih menghadapi problem keterlambatan, ketidaksesuaian alokasi, dan lemahnya pengawasan di tingkat sekolah (Rini et al., 2025). Dengan kata lain, “kebijakan biaya” bukan sekadar regulasi; ia adalah rangkaian keputusan administratif yang menentukan apakah beban biaya benar-benar berkurang di titik layanan.

Gap penelitian yang sering muncul adalah kecenderungan membahas biaya pendidikan pada level makro atau pada sekolah negeri, sementara praktik biaya pada sekolah swasta berbasis komunitas—termasuk madrasah—lebih banyak dibaca sebagai “urusan internal sekolah”. Akibatnya, pembahasan akses dan partisipasi sering berhenti pada angka pendaftaran, tidak masuk pada dimensi partisipasi harian seperti kehadiran, keterlibatan belajar, hingga partisipasi kegiatan pengembangan diri. Padahal, studi tentang partisipasi kegiatan di luar kelas menunjukkan bahwa biaya dan latar sosial-ekonomi dapat membentuk pola keterlibatan siswa, walau mekanismenya tidak selalu sesederhana “tidak mampu bayar” dan sering bercampur dengan faktor non-ekonomi seperti informasi, dukungan keluarga, dan norma (Hjalmarsson, 2022). Bagi madrasah dasar, isu ini relevan karena partisipasi sering terkait dengan kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program penguatan karakter yang kerap memerlukan kontribusi tambahan.

Landasan teori dalam penelitian ini bertumpu pada tiga gagasan. Pertama, pendidikan sebagai investasi sosial dan ekonomi, sehingga biaya dapat dibaca sebagai “hambatan harga” yang memengaruhi keputusan keluarga untuk masuk dan bertahan di sekolah. Kedua, pendidikan sebagai hak dan layanan publik, sehingga kebijakan pembiayaan harus menutup celah ketidaksetaraan yang lahir dari kemampuan bayar keluarga; laporan UNESCO tentang pembiayaan pendidikan di Indonesia menekankan pentingnya tata kelola dan pelaporan dana sekolah, termasuk BOS, dalam sistem desentralisasi (UNESCO, 2022). Ketiga, partisipasi sekolah sebagai konsep yang lebih luas daripada akses, mencakup keterlibatan akademik dan non-akademik yang sensitif terhadap biaya langsung maupun biaya peluang.

Literatur review lima tahun terakhir menunjukkan pola yang konsisten: kebijakan bantuan operasional dan bantuan terarah dapat memperbaiki akses, tetapi sering menyisakan “biaya sisa” pada rumah tangga dan sekolah. Di sisi rumah tangga, studi pengeluaran pendidikan menunjukkan iuran sekolah, perlengkapan, dan transportasi adalah komponen yang tidak selalu turun secara merata, terutama bagi kelompok rentan (Ayu & Qibthiyyah, 2023). Di sisi sekolah, kajian tentang BOS menempatkan dana operasional sebagai instrumen penting untuk pemerataan akses, namun menyoroti problem implementasi seperti keterlambatan penyaluran dan kapasitas manajemen sekolah (Rini et al., 2025). Pada sisi kebijakan siswa, risalah PSKP tentang PIP menekankan perlunya penguatan sasaran agar bantuan benar-benar menjangkau anak yang paling membutuhkan (PSKP, 2022). Sementara itu, kajian pembiayaan pendidikan global mengingatkan bahwa ekspansi “gratis biaya” tanpa penguatan sumber daya sekolah dapat memunculkan konsekuensi tidak diinginkan seperti tekanan kualitas dan beban guru, sehingga kebijakan biaya perlu selalu dikawinkan dengan kebijakan mutu dan kapasitas layanan (Gruijters, 2024).

Novelty penelitian ini terletak pada cara membumikan diskusi kebijakan biaya pendidikan ke ruang mikro madrasah dasar berbasis komunitas, dengan memisahkan akses sebagai pintu masuk dan partisipasi sebagai proses bertahan. Studi kasus MI Muhammadiyah Sidokerto dipilih untuk menunjukkan bagaimana kebijakan nasional dan teknis berubah menjadi praktik sekolah: bagaimana sekolah menafsirkan aturan, menutup kekurangan biaya, dan menjaga partisipasi siswa dalam realitas sosial-ekonomi lokal. Dengan begitu, pembahasan kebijakan tidak berhenti pada “apa aturan mengatakan”, melainkan bergerak pada “apa yang keluarga dan sekolah rasakan”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan biaya pendidikan dan bantuan operasional memengaruhi keputusan keluarga untuk mengakses MI Muhammadiyah Sidokerto; bagaimana kebijakan biaya pendidikan memengaruhi partisipasi siswa yang sudah terdaftar, terutama pada dimensi kehadiran, keterlibatan belajar, dan kegiatan pengembangan diri; serta bagaimana strategi tata kelola pembiayaan di tingkat madrasah dapat menyelaraskan bantuan pemerintah, kontribusi masyarakat, dan perlindungan bagi keluarga rentan agar akses dan partisipasi lebih berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus deskriptif dengan pendekatan analisis kebijakan dan pemetaan pembiayaan sekolah. Lokasi penelitian adalah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sidokerto, Plupuh, Sragen, dengan profil 352 siswa dan 20 guru pada tahun ajaran berjalan. Unit analisis adalah kebijakan biaya pendidikan yang terwujud dalam aturan, mekanisme pendanaan, serta praktik pembiayaan di tingkat satuan pendidikan.

Pendekatan utama dilakukan melalui tiga jalur yang saling melengkapi. Jalur pertama adalah analisis dokumen kebijakan untuk menegaskan definisi “biaya pendidikan” dan ruang gerak satuan pendidikan. Dokumen rujukan mencakup petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan (Kemendikbudristek, 2022), standar pembiayaan pada PAUD dan pendidikan dasar-menengah (Kemendikbudristek, 2023), risalah kebijakan PIP yang menyoroti sasaran dan rekomendasi perbaikan program (PSKP, 2022), serta dokumen juknis bantuan operasional pada madrasah (Kementerian Agama, 2022). Jalur kedua adalah pemetaan pembiayaan sekolah dengan menelusuri struktur biaya yang lazim muncul pada satuan pendidikan, mencakup biaya operasional harian, biaya program penguatan karakter/keagamaan, biaya kegiatan siswa, serta komponen pembelanjaan yang sering menimbulkan beban rumah tangga seperti seragam dan transportasi. Jalur ketiga adalah pembacaan konteks melalui data sekunder dan literatur lima tahun terakhir, terutama statistik pendidikan berbasis Susenas (BPS, 2023), kajian pengeluaran pendidikan rumah tangga (Ayu & Qibthiyah, 2023), serta studi tentang efektivitas dana BOS dan tantangan implementasinya (Rini et al., 2025).

Tahapan penelitian disusun sebagai alur kerja naratif. Pertama, peneliti menyusun kerangka konsep biaya pendidikan yang membedakan biaya langsung di sekolah dan biaya tidak langsung yang dikeluarkan keluarga. Kedua, peneliti memetakan kebijakan dan aturan yang mengatur ruang belanja dana bantuan operasional dan standar pembiayaan, kemudian menurunkannya menjadi kategori kebutuhan di tingkat sekolah. Ketiga, peneliti menyusun matriks akses dan partisipasi yang menghubungkan jenis biaya dengan kemungkinan dampaknya, misalnya biaya pendaftaran berkaitan dengan akses awal, sementara biaya transportasi dan seragam lebih berkaitan dengan kehadiran dan keberlanjutan. Keempat, peneliti melakukan analisis tematik untuk mengekstraksi implikasi kebijakan pada praktik pembiayaan MI Muhammadiyah Sidokerto, lalu membandingkannya dengan temuan literatur terkini agar hasil pembahasan tidak terputus dari bukti yang lebih luas.

Keabsahan pembahasan dijaga melalui triangulasi sumber, yakni mempertemukan isi kebijakan, statistik dan riset terbaru, serta konteks kelembagaan madrasah. Karena penelitian ini berorientasi pada pembacaan kebijakan dan pemetaan pembiayaan, hasil yang disajikan berupa temuan analitis dan implikasi praktis yang dapat dipakai sebagai kerangka evaluasi internal madrasah maupun rujukan penelitian lapangan lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak kebijakan biaya pendidikan terhadap akses masuk sekolah di MI Muhammadiyah Sidokerto

Akses sering dibaca sebagai “apakah anak terdaftar atau tidak”. Dalam praktiknya, akses adalah proses negosiasi: keluarga menimbang biaya langsung, biaya tidak langsung, dan risiko biaya masa depan. Pada madrasah berbasis komunitas, negosiasi ini terjadi dalam ruang sosial yang dekat: orang tua saling bertanya, guru memberi penjelasan, komite sekolah memberi arahan, dan informasi menyebar lewat jaringan tetangga. Karena itu, kebijakan biaya pendidikan bekerja melalui dua pintu: pintu formal berupa regulasi dan bantuan, serta pintu informal berupa persepsi masyarakat tentang “sekolah ini terjangkau atau tidak”.

Secara teori, biaya sekolah menurunkan permintaan pendidikan ketika keluarga menghadapi keterbatasan pendapatan, terutama bila biaya dibayar di muka atau pada awal tahun ajaran. Kebijakan bantuan operasional bertujuan menekan biaya rutin agar sekolah tidak membebankan biaya operasional kepada peserta didik, atau setidaknya mengurangi beban keluarga. Petunjuk teknis bantuan operasional satuan pendidikan menegaskan koridor pengelolaan dana agar belanja sekolah lebih akuntabel dan selaras dengan kebutuhan layanan pendidikan (Kemendikbudristek, 2022). Standar pembiayaan juga memberi definisi tentang biaya investasi dan biaya operasional serta kerangka perhitungan satuan biaya (Kemendikbudristek, 2023). Dalam konteks madrasah, juknis bantuan operasional Kementerian Agama menjadi rujukan tambahan yang menegaskan tujuan dana untuk membantu biaya operasional dan peningkatan mutu pembelajaran (Kementerian Agama, 2022).

Namun, pada level akses, yang paling menentukan sering kali bukan biaya operasional “di kertas”, melainkan biaya yang langsung terlihat oleh keluarga saat mendaftar. Di MI Muhammadiyah Sidokerto, sebagaimana lazim pada sekolah berbasis masyarakat, keluarga biasanya mempersiapkan biaya awal yang berhubungan dengan atribut sekolah: seragam, perlengkapan, dan kebutuhan pembelajaran. Literatur pengeluaran pendidikan rumah tangga membantu menjelaskan komponen ini. Ayu dan Qibthiyyah (2023) menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga tidak hanya iuran sekolah, tetapi juga peralatan sekolah dan transportasi, dan penurunan beban tidak selalu terjadi merata pada semua jenis pengeluaran. Ini penting karena keluarga miskin sering lebih sensitif terhadap biaya yang kecil tetapi harus dibayar sekaligus, seperti seragam dan buku, dibanding biaya yang dicicil.

Pada titik ini, PIP berpotensi menjadi “jembatan akses” karena membantu rumah tangga memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Risalah kebijakan PSKP menekankan bahwa PIP perlu terus ditingkatkan dan disempurnakan sarannya, termasuk memperhatikan kelompok yang belum bersekolah dan anak putus sekolah (PSKP, 2022). Ini relevan untuk akses MI karena sebagian keluarga dapat menunda pendaftaran ketika dana bantuan belum jelas atau mekanisme penerimaan belum dipahami. Di banyak kasus, kendala bukan hanya “tidak ada uang”, tetapi “tidak tahu prosedur” dan “tidak yakin bantuan akan cair tepat waktu”. Dengan kata lain, akses adalah kombinasi kemampuan bayar dan kepastian administratif.

Secara temuan analitis, kebijakan biaya pendidikan berpengaruh pada akses MI Muhammadiyah Sidokerto melalui tiga mekanisme. Mekanisme pertama adalah penurunan biaya operasional yang dapat mengurangi kebutuhan sekolah menarik iuran rutin besar, sehingga label “terjangkau” lebih mudah dibangun di mata masyarakat. Mekanisme kedua adalah pembagian beban biaya: ketika biaya rutin ditekan oleh dana operasional, beban bergeser ke biaya tidak langsung, terutama atribut sekolah dan transportasi. Mekanisme ketiga adalah sinyal keadilan: ketika sekolah memiliki skema keringanan atau dukungan berbasis data siswa rentan, keluarga lebih berani mengambil keputusan masuk sekolah karena risiko finansial terasa lebih bisa dikelola.

Diskusi ini selaras dengan temuan kajian BOS yang menyatakan dana operasional dapat mendorong peningkatan partisipasi pendidikan, tetapi tetap menghadapi tantangan implementasi, termasuk keterlambatan penyaluran dan ketidaksesuaian kebutuhan sekolah (Rini et al., 2025). Bagi akses, keterlambatan penyaluran dapat menjadi masalah serius karena sekolah harus tetap berjalan, sehingga sekolah terdorong mencari sumber dana alternatif yang kadang kembali dibebankan kepada orang tua pada momen-momen kritis seperti awal semester.

2. Dampak kebijakan biaya pendidikan terhadap partisipasi siswa yang sudah terdaftar

Partisipasi sering disalahpahami sebagai “anak masih sekolah”. Padahal, partisipasi adalah kehidupan sehari-hari anak di sekolah: hadir atau tidak, siap belajar atau tidak, mengikuti kegiatan pengembangan diri atau tidak, dan bertahan sampai lulus atau justru menghilang perlahan karena absensi dan keterlambatan. Biaya pendidikan berperan besar pada dimensi-dimensi ini karena biaya tidak selalu muncul sebagai “tagihan sekolah”; ia bisa muncul sebagai ongkos transportasi harian, uang saku, kuota internet ketika ada tugas daring, atau biaya kegiatan kelas.

Secara konteks nasional, statistik pendidikan berbasis Susenas menggambarkan capaian pendidikan sekaligus menegaskan pentingnya membaca indikator proses pendidikan bersama kondisi sosial-ekonomi (BPS, 2023). Dalam situasi rumah tangga rentan, satu kali kejutan ekonomi—panen gagal, sakit anggota keluarga, kehilangan pekerjaan—dapat mengubah pola partisipasi anak. Ini bukan semata keputusan ideologis, melainkan strategi bertahan hidup.

Secara teori, partisipasi dipengaruhi oleh “biaya berulang” dan “biaya peluang”. Pada usia MI, biaya peluang bekerja halus: anak mungkin diminta membantu orang tua di rumah atau di sawah, atau menjaga adik, terutama ketika sekolah dianggap menambah beban pengeluaran. Kebijakan biaya pendidikan yang efektif seharusnya menurunkan biaya berulang (transportasi, perlengkapan yang sering habis) dan menambah insentif bertahan (dukungan belajar, layanan yang membuat orang tua melihat sekolah sebagai investasi nyata).

Di sini, bantuan tunai pendidikan memiliki kontribusi. Bukti empiris menunjukkan PIP dapat menurunkan probabilitas putus sekolah pada kelompok tertentu, dengan variasi dampak antarjenjang dan periode (Samalo & Jasmina, 2024). Meski penelitian tersebut tidak khusus pada MI, logikanya relevan: ketika biaya rutin keluarga ditekan oleh bantuan, peluang anak bertahan meningkat. Namun, bila bantuan datang terlambat atau tidak menutup biaya dominan di suatu jenjang, efeknya bisa melemah. Risalah kebijakan PSKP juga mengingatkan perlunya memperbaiki sasaran dan mempertimbangkan kelompok anak yang berisiko tertinggal (PSKP, 2022).

Selain bantuan tunai, partisipasi juga dipengaruhi oleh kemampuan sekolah mengelola dana operasional untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Ketika dana

operasional digunakan untuk mendukung pembelajaran, kegiatan literasi, penguatan numerasi, atau layanan remedial, partisipasi akademik dapat meningkat karena anak merasa “terbantu” dan orang tua melihat hasilnya. Di jurnal pendidikan, evaluasi program BOS di sebuah sekolah menunjukkan kategori efektivitas yang tinggi pada sejumlah komponen evaluasi, sekaligus menandai adanya hambatan pada dimensi tertentu (Suwidana et al., 2022) . Walau konteksnya berbeda, pesan intinya sama: efektivitas dana operasional tidak otomatis; ia bergantung pada kapasitas manajemen dan kesesuaian penggunaan.

Partisipasi non-akademik juga penting bagi MI, terutama karena kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program karakter sering menjadi identitas madrasah. Namun kegiatan seperti pramuka, tahfidz tambahan, lomba, atau kunjungan edukatif kerap memerlukan biaya. Literatur tentang partisipasi ekstrakurikuler mengingatkan bahwa ada gradien sosial-ekonomi dalam keterlibatan, dan biaya sering hadir sebagai faktor yang “terlihat wajar” tetapi sebenarnya menyaring siapa yang bisa ikut (Hjalmarsson, 2022). Maka, kebijakan biaya pendidikan yang hanya menutup biaya operasional kelas dapat gagal menjaga partisipasi utuh bila dimensi pengembangan diri tidak ikut dipikirkan.

Pada kasus MI Muhammadiyah Sidokerto, temuan analitis menunjukkan bahwa kebijakan biaya pendidikan memengaruhi partisipasi melalui keterjangkauan biaya berulang, kejelasan mekanisme keringanan, dan desain program sekolah. Ketika sekolah mampu menempatkan bantuan operasional sebagai “penyangga” kegiatan dasar dan menyiapkan mekanisme subsidi untuk kegiatan tertentu bagi siswa rentan, partisipasi cenderung lebih stabil. Sebaliknya, ketika pembiayaan kegiatan bergantung pada iuran insidental, partisipasi menjadi rapuh dan menciptakan risiko eksklusi halus: anak tetap terdaftar, tetapi semakin jarang hadir atau tidak ikut kegiatan, lalu prestasi turun, motivasi melemah, dan akhirnya keluar dari sistem tanpa tercatat sebagai putus sekolah secara tiba-tiba.

3. Strategi tata kelola pembiayaan madrasah untuk memperkuat akses dan partisipasi secara berkelanjutan

Strategi tata kelola pembiayaan madrasah untuk memperkuat akses dan partisipasi secara berkelanjutan madrasah dapat menyelaraskan bantuan pemerintah, kontribusi masyarakat, dan perlindungan bagi keluarga rentan. Kuncinya ada pada tata kelola: cara sekolah membuat keputusan anggaran, cara sekolah berkomunikasi tentang biaya, dan cara sekolah membangun mekanisme keadilan tanpa merusak keberlanjutan lembaga.

Dari sisi regulasi, petunjuk teknis bantuan operasional menekankan tata kelola dan akuntabilitas penggunaan dana (Kemendikbudristek, 2022), sementara standar pembiayaan memberi kerangka agar sekolah memahami struktur biaya investasi dan operasional (Kemendikbudristek, 2023). Pada ranah madrasah, juknis Kementerian Agama mengatur tujuan dan mekanisme penggunaan bantuan operasional di RA dan madrasah (Kementerian Agama, 2022). Secara prinsip, regulasi menyediakan pagar. Tetapi pagar tidak otomatis menjadi jalan. Jalan dibentuk oleh kapasitas manajemen sekolah dan budaya transparansi.

Literatur tentang BOS memperlihatkan bahwa tantangan implementasi sering berada pada level teknis: keterlambatan penyaluran, ketidaksesuaian kebutuhan, dan lemahnya pengawasan; tetapi juga menunjukkan peluang ketika pelaporan dan transparansi diperkuat, termasuk melalui digitalisasi (Rini et al., 2025). Untuk MI Muhammadiyah Sidokerto, strategi yang relevan bukan hanya “menambah dana”, melainkan mengubah cara dana bekerja bagi keadilan akses dan partisipasi.

Strategi pertama adalah memetakan biaya nyata dari perspektif keluarga, bukan hanya dari perspektif laporan sekolah. Pemetaan ini membedakan biaya awal, biaya berulang, dan biaya insidental. Temuan studi pengeluaran rumah tangga menegaskan komponen seperti

transportasi dan peralatan sekolah dapat menjadi beban penting (Ayu & Qibthiyyah, 2023) . Jika sekolah memahami komponen dominan di komunitasnya, sekolah dapat merancang intervensi yang lebih tepat, misalnya kerja sama pengadaan seragam lebih murah, skema tabungan seragam, atau pengaturan jadwal kegiatan berbiaya agar tidak menumpuk pada satu bulan.

Strategi kedua adalah memperkuat penargetan keringanan dengan data yang sederhana namun adil. PIP memiliki tujuan jelas, namun risalah PSKP menunjukkan perlunya penguatan sasaran dan perluasan jangkauan (PSKP, 2022). Sekolah dapat berperan sebagai simpul informasi: membantu keluarga memahami prosedur, memastikan dokumen siap, dan meminimalkan kebocoran informasi. Penargetan juga perlu sensitif terhadap stigma; keringanan yang tidak dirancang baik dapat membuat keluarga enggan mengajukan karena takut dipermalukan. Tata kelola yang populer dan manusiawi menempatkan keringanan sebagai hak layanan, bukan belas kasihan.

Strategi ketiga adalah menjadikan bantuan operasional sebagai “penjamin layanan minimum” yang melindungi kualitas dasar. Kebijakan biaya pendidikan yang hanya menekan biaya tetapi membiarkan kualitas turun dapat memunculkan efek tidak diinginkan. Pelajaran dari studi kebijakan penghapusan biaya di konteks lain menunjukkan akses bisa naik, tetapi kualitas dan beban sumber daya bisa tertekan bila desain tidak matang (Gruijters, 2024). MI perlu memastikan bahwa pengurangan beban biaya tidak dibayar dengan menurunnya pengalaman belajar. Ini dapat dilakukan dengan memprioritaskan belanja yang langsung memengaruhi pembelajaran, seperti bahan ajar inti, dukungan literasi, perawatan kelas, dan pengembangan guru.

Strategi keempat adalah menata pembiayaan kegiatan pengembangan diri agar inklusif. Identitas MI sering kuat pada kegiatan keagamaan dan ekstrakurikuler. Jika kegiatan ini berbiaya dan dibiarkan sepenuhnya ditanggung keluarga, risiko eksklusi meningkat. Literatur partisipasi ekstrakurikuler mengingatkan bahwa gradien sosial-ekonomi dapat muncul bahkan ketika sekolah tidak bermaksud diskriminatif (Hjalmarsson, 2022). Karena itu, sekolah dapat mengadopsi prinsip subsidi silang yang transparan, atau membangun “dana partisipasi” dari kombinasi donasi alumni, mitra lokal, dan sebagian alokasi yang diperbolehkan, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk ikut program pengembangan diri.

Strategi kelima adalah membangun komunikasi biaya yang sederhana, konsisten, dan empatik. Banyak konflik biaya sekolah muncul bukan karena biaya selalu besar, tetapi karena orang tua merasa “mendadak” dan “tidak jelas”. Pendekatan populer untuk jurnal kepemimpinan dan manajemen sekolah menempatkan komunikasi sebagai bagian dari tata kelola. Ketika sekolah menjelaskan kebutuhan, sumber dana, dan alasan suatu biaya, kepercayaan meningkat. Kepercayaan membuat orang tua lebih bersedia berpartisipasi, dan partisipasi orang tua sering menjadi faktor pelindung bagi keberlanjutan siswa di sekolah.

Dengan demikian, terlihat bahwa kebijakan biaya pendidikan bekerja paling kuat ketika tiga aktor bergerak bersama: negara menyediakan kerangka dan dana; sekolah mengelola dana secara adil dan efektif; rumah tangga memperoleh dukungan yang cukup untuk menutup biaya tidak langsung. Laporan UNESCO tentang pembiayaan pendidikan di Indonesia mengingatkan pentingnya sistem pelaporan dan perencanaan di tingkat sekolah dalam kerangka desentralisasi (UNESCO, 2022). Artinya, penguatan kapasitas sekolah bukan pekerjaan tambahan; ia adalah syarat agar kebijakan biaya pendidikan berubah dari dokumen menjadi akses dan partisipasi yang nyata.

KESIMPULAN

Kebijakan biaya pendidikan berpengaruh nyata terhadap akses dan partisipasi sekolah, tetapi pengaruhnya tidak selalu berjalan lurus. Studi kasus analitis pada MI Muhammadiyah Sidokerto, Plupuh, Sragen (352 siswa; 20 guru) menunjukkan bahwa dukungan operasional sekolah dan kerangka standar pembiayaan memberi fondasi penting untuk menekan tekanan biaya rutin layanan pendidikan. Namun demikian, akses masuk sekolah masih sangat dipengaruhi oleh biaya tidak langsung yang paling “terlihat” oleh keluarga pada awal tahun ajaran, terutama seragam, perlengkapan belajar, transportasi, dan kebutuhan insidental yang muncul dalam proses bersekolah.

Pada dimensi partisipasi, kebijakan biaya pendidikan tidak cukup diukur dari status terdaftar. Partisipasi yang sehat mencakup kehadiran yang konsisten, keterlibatan aktif dalam proses belajar, serta kesempatan mengikuti kegiatan pengembangan diri. Dalam praktiknya, biaya berulang dan biaya kegiatan menjadi faktor yang rapuh, terutama bagi rumah tangga rentan, karena beban tersebut muncul terus-menerus dan sangat bergantung pada kondisi arus kas keluarga. Bantuan terarah kepada peserta didik dapat berperan sebagai penyangga, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kepastian prosedur, dan ketepatan waktu penyaluran. Di tingkat sekolah, tantangan implementasi pendanaan—seperti keterlambatan, kesesuaian kebutuhan belanja, dan kapasitas manajemen—menentukan apakah kebijakan benar-benar berubah menjadi keringanan yang dirasakan keluarga dan berdampak pada keberlanjutan partisipasi siswa.

Implikasinya, madrasah memerlukan strategi tata kelola pembiayaan yang memadukan kepatuhan pada aturan, pemetaan biaya dari perspektif keluarga, penargetan keringanan berbasis data, serta desain program kegiatan siswa yang inklusif. Kebijakan biaya pendidikan akan lebih efektif bila dipandang sebagai ekosistem: dukungan operasional melindungi layanan minimum, bantuan siswa membantu menutup biaya rumah tangga yang paling kritis, dan transparansi pengelolaan sekolah menjaga kepercayaan masyarakat sehingga akses dan partisipasi dapat terpelihara secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Ayu, P. P., & Qibthiyah, R. M. (2023). Pengeluaran pemerintah daerah dan rumah tangga untuk pendidikan menurut kelompok pendapatan. *JESI: Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*, 3(2), 125–135.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Executive summary of consumption and expenditure of Indonesia March 2022*. BPS-Statistics Indonesia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pendidikan 2023*. Badan Pusat Statistik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))
- Czarnecki, K., & Korpi, T. (2025). More funding, more students? Student funding policies and tertiary education enrolment ratios in 32 high-participation countries. *Higher Education*. ([Springer Nature Link](#))
- Gruijters, R. (2024). The intended and unintended effects of secondary school fee abolition: Evidence from Ghana’s free senior high school policy. [*Publication record*]. ([research-information.bris.ac.uk](#))
- Hjalmarsson, S. (2022). Pay to play? Economic constraints and participation in extracurricular activities. *European Sociological Review*, 39(4), 586–. ([OUP Academic](#))
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2022). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 6065 Tahun 2021 terkait Petunjuk Teknis Pengelolaan BOP dan BOS pada Madrasah Tahun Anggaran 2022* (PDF). ([madrasahreform.kemenag.go.id](#))
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022*

tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. (Peraturan BPK)

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah* (PDF). (jdih.kemendikdasmen.go.id)
- Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP). (2022). *Risalah Kebijakan PSKP No. 2 Juni 2022: Program Indonesia Pintar (PIP)*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (pskp.kemendikdasmen.go.id)
- Rini, A. P. A., Muntahar, M. F., Paola, V. S., Ramadhan, S. A., & Nursita, L. (2025). Evaluation of the impact of BOS fund budget policy on the education sector. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1). ([Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar](http://RumahJurnalUINAlauddinMakassar.com))
- Samalo, N. A., & Jasmina, T. (2024). The effect of educational cash transfer for students from low-income families on students' dropout rate in Indonesia. In *The Asian Conference on Education & International Development 2024: Official Conference Proceedings*. The International Academic Forum. ([ResearchGate](https://www.researchgate.net))
- Suwidana, I. K., [dkk.]. (2022). Effectiveness of the Regular School Operational Assistance (BOS) program at SMAN Bali Mandara. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 13(1), 115-123.
- UNESCO. (2022). *The financing of education in Indonesia*. UNESCO. ([UNESCO Documents](http://unesco.org))
- UNESCO. (2022). *Education finance watch 2022*. Global Education Monitoring Report. (unesco.org)
- World Bank. (2025). Government expenditure on education, total (% of GDP) - Indonesia. *World Bank Data*. ([World Bank Open Data](http://data.worldbank.org))
- World Bank. (2025). Government expenditure on education, total (% of GDP) - Indonesia (indicator metadata and series). *World Bank Data*. ([World Bank Open Data](http://data.worldbank.org))

Copyright holder :

© Penulis 1 2 dan 3 dengan model APA

First publication right:

Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah

This article is licensed under:

